

Judul : Sejumlah Partai Usulkan Ambang Batas Parlemen Dinaikkan
Tanggal : Senin, 23 Februari 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

PEMILU

Sejumlah Partai Usulkan Ambang Batas Parlemen Dinaikkan

Nino Citra Anugrahanto

Sejumlah partai politik membuka ruang untuk menaikkan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) dari semula 4 persen, di tengah rencana revisi Undang-Undang Pemilu. Efektivitas kinerja partai politik dinilai menjadi salah satu pertimbangan.

Wacana ini tentu saja tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi pada 2024 yang menghapus ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional. Ambang batas itu dinilai tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kapasitas hukum yang dijamin oleh konstitusi.

Putusan itu dijatuhkan atas gugatan yang diajukan Perikumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang menilai ketentuan ambang batas tersebut telah menyebabkan hilangnya suara rakyat atau besarnya suara pemilih yang tidak terkonsolidasi menjadi kursi di DPR.

Lantas, berapa persen yang diusulkan?

Ketua Partai Nasdem Surya Paloh menyampaikan, partai ini konsisten mengusulkan kenaikan ambang batas parlemen menjadi 7 persen dari semula 4 persen. Ia menilai, adanya pembatasan jumlah partai politik di parlemen akan mengoptimalkan kinerja de-

molokrasi bagi segenap masyarakat. Ia tak menampik jika terpaksi perubahan sistem kepartaian dari multipartai menjadi *selected party*.

"Kita terlalu gembira dengan banyaknya seluruh partai-partai politik untuk dan atas nama kepentingan demokrasi itu sendiri. Tetapi, di sisi lain, untuk apa demokrasi kalau tidak membawa asas manfaat dan konsistensi kita menuju arah cita-cita kemerdekaan yang kita miliki?" kata Paloh di Jakarta, Sabtu (21/2/2026).

Dalam menjalankan demokrasi, ujar Paloh, partai politik tidak bisa lagi herkatut urusan pencitraan. Lebih dari itu, hal-hal esensial lebih mendasar untuk disentuh. Lantas, partai politik diingatkan kembali agar tidak lupa posisi dan perannya untuk senantiasa membangun kesadaran politik masyarakat.

Selain itu, lanjut Paloh, demokrasi tidak bisa sekadar dinamai kebebasan memilih. Seiring kebebasan diberikan, menurut dia, demokrasi juga menyertakan tanggung jawab. Diyakininya, negeri ini membutuhkan keseimbangan antara hak dan kewajiban dari para elitnya. Menurut dia, sosok-sosok yang berani mengutarakan pikiran-pikiran hebat harus menunjukkan keteladanan pula.

"Ucapan sebanding dengan perbuatan. Ada konsistensi di sana. Bangsa ini butuh itu. Ka-

lan enggak, kita terjebak pada seluruh keputra-putraian terus-menerus dari waktu ke waktu," kata Paloh.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menyatakan, proses penyusunan Rancangan Undang-Undang Perubahan atas UU Pemilu terus berproses. DPR terus mengumpulkan masukan dari berbagai kalangan demi menghasilkan partisipasi publik yang baik dalam regulasi tersebut, termasuk soal ambang batas parlemen. Lebih-lebih, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah mengeluarkan putusan yang menginstruksikan DPR untuk segera mengatur penurunan angka ambang batas.

Dalam sidang uji materi UU No 7/2017 tentang Pemilu, pada Februari 2024, MK menyatakan, ketentuan Pasal 414 Ayat (1) UU Pemilu yang mengatur ambang batas parlemen 4 persen masih konstitusional digunakan pada Pemilu 2024. Namun, ambang batas parlemen sebesar 4 persen itu tidak bisa lagi diberlakukan pada Pemilu 2029. MK memerintahkan pembentuk undang-undang untuk mengubah ketentuan ambang batas parlemen tersebut melalui revisi UU Pemilu.

"Sebagai konsekuensi yuridisnya, norma Pasal 414 Ayat (1) UU No 7/2017 haruslah dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang masih tetap diberlakukan untuk hasil Pemilu DPR 2024 dan tidak di-

Saya kurang lebih pasti di atas 5 (persen)-lah ya.

Aria Bima

berlakukan untuk hasil Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya kecuali setelah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas dan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen," kata Wakil Ketua MK Saldi Isra kala itu.

Inginkan di atas 4 persen

Jika merujuk dari partainya, yakni PDI-P, jelas Aria, ambang batas parlemen juga mesti memperhatikan aspek demokrasi substansial. Dasar persentase ambang batas parlemen harus mempertimbangkan kinerja para wakil rakyat yang terpilih. Apalagi, sekarang jumlah bidang yang diurus mencapai 13 komisi. Jumlah itu masih ditambah badan dan alat kelengkapan dewan yang lain.

Meski demikian, ihwal ambang batas ideal, Aria belum bisa memastikannya. Menurut dia, jika merujuk hasil Pemilu 2024, partai-partai yang berhasil lolos parlemen mampu mencatatkan perolehan suara di atas 6 persen. Bahkan, PDI-P bisa mencapai 20 per-

sen. Sejaht ini, ujarnya, postur anggota dewan yang ada bisa bekerja optimal.

Untuk itu, Aria merasa keberatan jika ambang batas parlemen akan diturunkan sehubungan dengan beban kerja dari 13 komisi. Ia sadar soal representasi keterwakilan dari partai-partai politik perlu diperhatikan agar rakyat tak kehilangan aspirasinya. Tetapi, ia menekankan agar postur tugas dan jumlah anggota dewan turut dipertimbangkan.

"Kalau di sini enggak bisa kerja, bagaimana? Jumlahnya hanya terbatas. Atau mau kita turunkan? Yang 4 (persen) saja sudah mengos-mengos (kepayahan), apalagi 3 (persen) gitu ya. Saya kurang lebih pasti di atas 5 (persen)-lah ya," kata Aria.

Suara rakyat terbuang

Direktur Eksekutif Perludem Heroik M Pratama menyampaikan, ambang batas parlemen memberikan dampak negatif berupa terbuangnya suara pemilih. Dia memberi contoh, pada Pemilu 2024, hanya delapan dari 18 partai politik peserta yang mampu melampaui ambang batas 4 persen. Imbasnya, ada sekitar 17 juta suara terbuang yang sudah disalurkan pemilih ke 10 partai yang tidak lolos ambang batas tersebut.

"Kalau dinaikkan sampai 7 persen akan berpotensi semakin tingginya suara terbuang atau *wasted vote*, yang berdam-

pak pada semakin tidak proporsionalnya hasil pemilu kita," kata Heroik.

Menurut Heroik, wacana peningkatan besaran ambang batas tidak sejalan dengan putusan MK. Jika tetap dilakukan, sebut dia, kedaulatan suara pemilih berarti diabaikan. Ancaman terbuangnya suara pemilih juga akan semakin tinggi.

Di sisi lain, lanjut Heroik, peningkatan besaran ambang batas juga tidak serta-merta berhasil menyederhanakan sistem kepartaian secara signifikan. Pada Pemilu 2014, ambang batas parlemen naik menjadi 3,5 persen dari semula 2,5 persen saat Pemilu 2009. Adanya peningkatan itu ternyata disertai peningkatan jumlah partai di parlemen, dari 9 partai politik menjadi 10 partai politik.

"Kalaupun tujuan untuk penyederhanaan partai dan efektivitas parlemen, terdapat variabel lain dari sistem pemilu yang dapat diubah, yaitu dengan memperkecil alokasi kursi di dapil dari 3-10 kursi menjadi 3-8 kursi, atau menggunakan fraksi *threshold* yang mensyaratkan jumlah minimal kursi untuk membentuk fraksi," kata Heroik.

Dihubungi secara terpisah, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menyampaikan, idealnya ambang batas parlemen dibuat

moderat. Tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Masing-masing ambang batas parlemen yang ekstrem itu membawa risiko tersendiri.

Arya menjelaskan, ambang batas parlemen yang terlalu tinggi mampu mengakibatkan rendahnya representasi atau keterwakilan partai-partai di DPR. Pasalnya, peluang lolos parlemen semakin menyempit bagi partai-partai menengah dan kecil. Itulah yang membuat usulan penurunan ambang batas parlemen selalu mencuat setiap momen revisi UU Pemilu.

Sebaliknya, ujar Arya, ambang batas parlemen yang terlalu rendah mengakibatkan jumlah partai politik terlalu banyak di DPR. Jika jumlahnya terlalu ekstrem, menurut dia, jalannya pemerintahan bakal terganggu. Bahkan, risiko paling bahaya adalah munculnya para pemain "veto" yang membuat penyusunan legislasi semakin sulit. Pemerintah juga bakal limbung karena harus bernegosiasi dengan banyak partai.

"Untuk itu, angka yang moderat di titik tengah itu perlu. Jadi, menyeimbangkan antara representasi politik dan efektivitas kemampuan pemerintahan memimpin, atau *governability*. Maka, solusinya diturunkan secara bertahap. Misalnya, sekarang dari 4 persen menjadi 3,5 persen, lalu nanti pemilu selanjutnya 3 persen," kata Arya.